

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan adalah salah satu alat komunikasi antar para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Secara internal, laporan keuangan seringkali digunakan sebagai rujukan manajemen untuk melakukan perbaikan operasional, sedangkan bagi pihak eksternal laporan keuangan umumnya digunakan untuk menentukan kebijakan investasi. Di titik inilah pentingnya kualitas informasi menjadi bahan pertimbangan para pembaca laporan keuangan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana dijabarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia salah satunya adalah dapat dipahami dan relevan.<sup>2</sup> Kualitas relevan atas laporan keuangan menekankan pada kemampuan laporan keuangan sebagai alat untuk menjelaskan peristiwa di masa lalu, memberikan gambaran yang memadai tentang kejadian masa kini, dan menjadi alat prediksi untuk kejadian di masa depan. Artinya, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terkait apa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai bahan perbaikan, memberikan informasi saat ini sebagai pedoman operasional, serta menjadi alat

---

<sup>2</sup> Suwandi Miskak, *Kegagalan Analisis Laporan Keuangan dalam Memprediksi Kebangkrutan BPR/BPRS di Indonesia*, Kajian Ekonomi Keuangan 3 Nomor 3 Tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal, 1 Mei 2020. Hal 164

untuk memprediksi kondisi di masa depan melalui berbagai tren dan kejadian sebelumnya.

Kenyataannya, tren laporan keuangan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian berdasarkan laporan keuangan. Seperti yang terjadi pada kasus ditutupnya 84 BPR/BPRS pada rentang 2005-2017 oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akibat ketidakmampuan BPR/BPRS memenuhi rasio kecukupan modal minimum secara aktual.<sup>3</sup> Ketidaksesuaian antara rasio kecukupan modal minimum perkiraan dan kecukupan modal minimum aktual membuat bank luput dari pengawasan khusus yang berpotensi menjadi bank gagal. Kasus kebangkrutan lain yang salah satunya disebabkan oleh ketidakjelian investor menempatkan dana tanpa mempertimbangkan kelayakan laporan keuangan adalah skandal perusahaan Enron yang mengajukan kebangkrutan pada 2021.<sup>4</sup> Dimana pada saat itu khalayak didorong untuk melakukan pembelian saham hanya dengan pertimbangan bahwa saham sedang dalam harga terjangkau dan perusahaan sedang bangkit tanpa mempertimbangkan kinerja laporan keuangan dengan baik.

Kondisi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan terstandarisasi, yang dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi yang komprehensif dalam format yang dipersyaratkan diharapkan dapat memberikan informasi secara utuh pada para pembaca laporan keuangan. Kegagalan dalam membaca laporan keuangan dapat mengacaukan

---

<sup>3</sup> Ibid., 161

<sup>4</sup> Tito Hilmawan Redita, *Kisah Kebangkrutan Enron pada 2021, Skandal Terbesar AS*, Kompas.com, 2 Desember 2021

penilaian apakah perusahaan sedang dalam performa terbaik, dalam masa pengembangan atau ekspansi usaha, atau sedang dalam penurunan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Kondisi terakhir ini harus dapat diantisipasi oleh para pembaca laporan keuangan. Kondisi dimana perusahaan mengalami tekanan atas keuangan dan mengarah pada penurunan performa yang umumnya dikenal dengan istilah *financial distress*.

Alih-alih menggunakan perhitungan laba sebagai tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan, para pembaca laporan keuangan dapat melakukan penilaian laporan keuangan salah satunya dengan berfokus pada aktivitas operasi perusahaan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana aktivitas operasi tidak mampu memenuhi kewajiban.<sup>5</sup> Pada tahap *distress*, perusahaan akan mengalami masalah likuiditas yang akhirnya menggerakkan posisi dari perusahaan *solvent* menjadi *distress* kemudian menjadi perusahaan *insolvent* yang gagal memenuhi baik kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.<sup>6</sup> Kondisi ini dialami pula oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dimana sejak terjadinya Pandemi Covid-19, saat tingkat *financial distress* para pelaku usaha meningkat hingga mendorong 1,87% usaha gulung tikar atau berhenti beroperasi karena tidak dapat bertahan.<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikaruniai akan kekayaan sumber daya alam, termasuk bahan galian tambang. Bahan galian ini meliputi berbagai mineral seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, serta batubara.

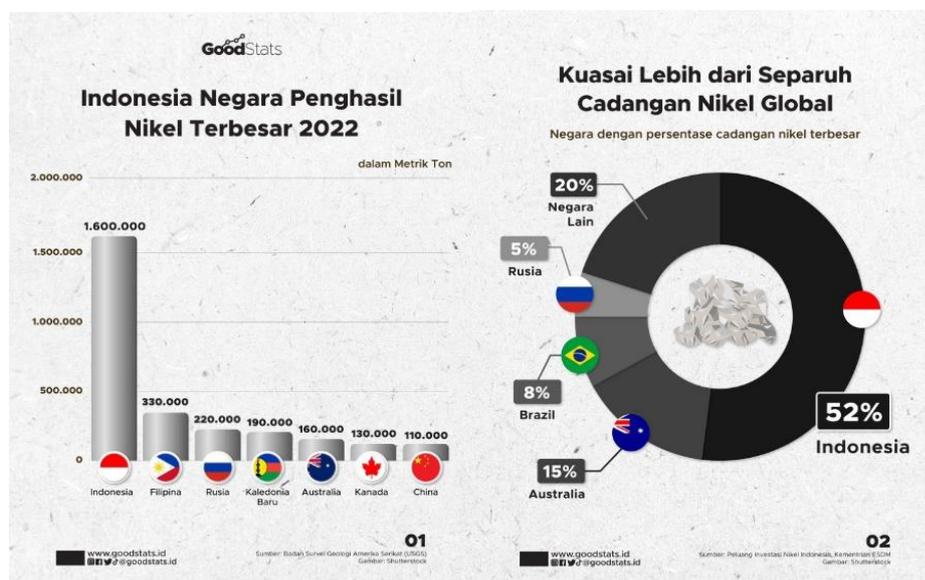
---

<sup>5</sup> Isnaini Nuzula Agustin dan Andryanto, *Apakah Elemen Corporate Governance Dapat Mengurangi Financial Distress Pada Perusahaan Berisiko Tinggi*, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 25, No. 1, June 2023, Hlm. 131-152

<sup>6</sup> Miskak, *Kegagalan Analisis*, 163

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Hasil Survei Kegiatan Usaha pada Masa Pandemi Covid-19*, BPS RI, 2021, Hal. 4

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dinyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, bahan galian merupakan kekayaan alam yang dikuasai langsung oleh negara dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.



Gambar 1: Penghasil Nikel Terbesar Tahun 2022

Sumber: GoodStats.id 24 Februari 2023

Sektor pertambangan Indonesia berhasil menduduki jajaran negara penghasil bahan tambang terbesar dan terbaik di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara dengan potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Contohnya, menurut laporan terkait mineral nikel, Indonesia menempati posisi ketiga teratas negara penghasil nikel tingkat global. Indonesia juga mencatat kontribusi 39% atas produk

emas, berada di posisi kedua setelah China.<sup>8</sup> Bahkan berdasarkan data yang dilansir oleh GoodStats.id pada tahun 2023, Indonesia tercatat menguasai lebih dari separuh cadangan nikel dunia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sebagai penguasa separuh cadangan nikel dunia menguntungkan Indonesia karena membuka peluang sebagai produsen bahan baku baterai yang banyak dicari untuk keperluan kendaraan listrik.

Kegiatan pertambangan mencakup berbagai tahap, dimulai dari penyelidikan awal, eksploitasi sumber daya, analisis kelayakan, pembangunan fasilitas, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil tambang, hingga distribusi dan pemasaran. Keseluruhan kegiatan ini tentu mendorong kesempatan terbukanya area produktif pada sektor riil yang menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan teknologi, serta berkembangnya peluang usaha baik bagi investor lokal maupun asing. Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa sektor pertambangan menyumbang kontribusi yang signifikan bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Realisasi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023 (data kumulatif triwulan III) sebanyak 308.107 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 orang Tenaga Kerja Asing (TKA).<sup>9</sup>

Selain membuka peluang pada sektor riil, keberadaan berbagai lahan pertambangan juga membuka peluang investasi pada sektor portofolio. Hal ini mendorong para investor muda untuk memiliki perusahaan dalam bentuk investasi

---

<sup>8</sup> Sony Budiarmo dan Leila Chanifah Zuhri, *Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia*, Publikasi Universitas Gajah Mada tanggal 18 Oktober 2019

<sup>9</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Sektor Pertambangan Serap 300 Ribu Tenaga Kerja di 2023*, Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 45.Pers/04/SJI/2024 tanggal 17 Januari 2024

saham pada sektor menjanjikan yang terus berkembang di Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor di pasar modal Indonesia telah melampaui 13 juta SID (*Single Investor Identification*), dengan peningkatan lebih dari 863 ribu SID sepanjang tahun 2024.<sup>10</sup> Meskipun pada awal tahun 2024 sektor pertambangan diperkirakan mengalami penurunan investasi akibat rampungnya pembangunan dua proyek *smelter* jumbo di dalam negeri, namun perkembangan investor Indonesia menunjukkan terbukanya partisipasi dan kontribusi masyarakat Indonesia secara langsung dalam upaya pengembangan pasar modal.<sup>11</sup>

Harus disadari bahwa risiko investasi pada perusahaan yang berkembang di bidang sektor sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati. Berbagai risiko yang dihadapi harus dipertimbangkan mulai dari kesehatan perusahaan, manajemen yang baik, hingga ketaatan peraturan yang mendasari kegiatan usaha sektor riil. Meskipun menyumbang besar pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP), perusahaan pertambangan khususnya harus mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>12</sup>

Menurut Misra, “*The Sustainable Development Goals (SDGs) are a global appeal to protect the environment, combat climate change, eradicate poverty, and ensure access to a high quality of life and prosperity for all.*”<sup>13</sup> Mengacu pada hal tersebut, perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada keuantungan finansial,

---

<sup>10</sup> Bursa Efek Indonesia, *Investor Pasar Modal Tembus 13 Juta, Kolaborasi dengan Komunitas dan IDX Mobile Jadi Andalan*, Press Release No: 039/BEI.SPR.06-2024 tanggal 25 Juni 2024.

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Budiarmo, *Indonesia Salah*, 1

<sup>13</sup> Manoranjan Mishra, et al, *A Bibliometric Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs): a review of progress, challenges, and opportunities*, Springer Nature B.V., 2023

namun memperhatikan aspek lain seperti upaya pengendalian iklim, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat cenderung mengubah pola pikir korporasi menuju konsep *triple bottom line*, yang mencakup aspek finansial, sosial, dan lingkungan. Ketiga faktor ini berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan.<sup>14</sup>

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui kewajiban yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan kewajiban pada masyarakat sekitar lokasi usaha sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang secara alami terbentuk sebelum kegiatan pertambangan diinisiasi. CSR merupakan “bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan citra perusahaan, kegiatan *corporate social responsibility* dapat menarik konsumen sehingga dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat meningkatkan penjualan”.<sup>15</sup> CSR dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan yang tidak semata berfokus pada peningkatan penjualan perusahaan. CSR dapat diarahkan untuk kegiatan pendidikan, olahraga, pengendalian iklim, hingga penelitian dan pengembangan.

Bahkan saat ini berkembang sebuah konsep perluasan dari CSR dengan memasukkan unsur keagamaan. Hal ini tentunya sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. CSR yang diterapkan dengan nilai-nilai syariah dikenal dengan nama *Islamic Corporate Social*

---

<sup>14</sup> Ni Nyoman Ayu Suryandari, dkk. *Nilai Perusahaan Ditinjau dari Tanggung Jawab Sosial, Tata Kelola, dan Kesempatan Investasi Perusahaan*. Accounting Profession Journal (ApaJi), Vol. 2 No. 2, Juli 2020. Hal 95

<sup>15</sup> Vivi Astrika, dkk, *Pengaruh CSR, GCG, Agresivitas Pajak terhadap Financial Distress*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 01, Number 05, 2023 pp. 50-60

*Responsibility* (ISCR). ICSR adalah tanggung jawab organisasi yang menyadari bahwa bisnis harus didasarkan pada Alquran dan Sunah. CSR yang dikelola dalam *islamic framework* berpengaruh positif pada performa keuangan perusahaan.<sup>16</sup> Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan ICSR ternyata mampu meningkatkan kinerja keuangan yang tentu saja menarik bagi para pembaca laporan keuangan.

Sebagai investor, laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang layak dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak ditebus sahamnya sebagai sarana investasi. Laporan keuangan memberikan informasi tentang kesehatan operasional perusahaan, manajemen perusahaan, kebijakan, hingga informasi lain terkait ketaatan perusahaan pada peraturan yang berlaku. Dalam dunia investasi, laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi pada calon investor. Menurut Ishinagi, “*The managers who initially announced optimistic earnings forecast will revise and release pessimistic earnings forecast when financial statement complexity stems from reporting complexity.*”<sup>17</sup> Para manajer yang dapat menampilkan laporan keuangan yang kompleks dalam sajian yang mudah dipahami serta proyeksi penghasilan yang optimis ditemukan lebih menarik minat para investor. Optimisme para manajer dalam memprediksi penghasilan merupakan keahlian yang dilatarbelakangi keilmuan dan pengalaman tinggi bernilai mahal bagi perusahaan. Kelihaihan para pengambil keputusan pada

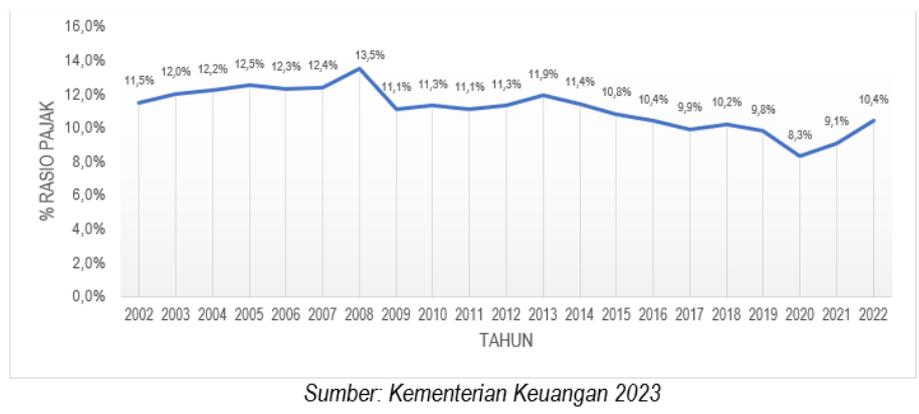
---

<sup>16</sup> Maya Indriastuti dan Naila Najihah, *Improving Financial Performance Through Islamic Corporate Social Responsibility and Islamic Corporate Governance*, Jurnal Riset Akuntansi Bisnis Airlangga, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm 818-833

<sup>17</sup>Yoshikazu Ishinagi dan Atsushi Shiiba, *Management Earnings Forecast and Financial Statement Complexity*, Journal of Accounting and Public Policy, Volume 42, Issue 4, July-Agustus 2023

perusahaan dalam hal ini mengambil peran penting yang diwujudkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. GCG juga diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang paling menguntungkan. Beberapa kebijakan ini antara lain terkait efisiensi operasional, pengembangan bisnis, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain tanggung jawab sosial perusahaan, hal penting yang banyak disorot oleh para investor dalam laporan keuangan perusahaan adalah kebijakan terkait hutang bagi pengembangan atau ekspansi usaha, serta kebijakan terkait kepatuhan di bidang perpajakan.



Gambar 2: Data Rasio Pajak Indonesia Tahun 2002 s.d. 2022

Sumber: Indonesia Fiscal and Tax Administration Association, 13 November 2023

Di Indonesia, terdapat konsep perencanaan pajak (*tax planning*), yang mencakup penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk

mengurangi kewajiban pajak dengan metode yang tetap mematuhi hukum.<sup>18</sup> Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan masa kini dengan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar saat ini, dengan cara-cara yang diperbolehkan. Sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan cara-cara yang ilegal atau melawan hukum. Perencanaan pajak bukanlah isu baru di Indonesia. Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan untuk menghindari tekanan keuangan dengan tetap memperhatikan tingkat kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sayangnya, praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat mendorong melemahnya *tax ratio* secara nasional. Gambar 2 di atas menyajikan data yang diolah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa angka *tax ratio* Indonesia belum dapat dikatakan menunjukkan kestabilan, justru menunjukkan tren menurun dibandingkan 20 tahun yang lalu.

Perusahaan mengumpulkan dana untuk modal usaha umumnya berasal dari setoran modal pemilik (*owner*), penerbitan saham, serta sumber eksternal melalui hutang. Kebijakan perusahaan untuk melakukan hutang pada pihak ketiga merupakan kebijakan manajerial yang diambil sesuai tujuan perusahaan. Hutang bukan melulu hal yang buruk. Hutang yang dikelola dengan baik justru dapat meningkatkan efisiensi operasi serta salah satu metode pengembangan usaha yang efektif. Hutang yang terlalu besar pada neraca perusahaan yang tidak diimbangi

---

<sup>18</sup> Michelle Hanlon dan Shane Heitzman, *A Review of Tax Research*, Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 127-178

dengan kemampuan membayar bunga dan pokoknya akan menyebabkan tekanan yang serius pada posisi keuangan. Rasio hutang terhadap aset yang dimiliki perusahaan dikenal dengan rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu melunasi kewajiban hutangnya dengan aset yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan.<sup>19</sup>

Godfrey et al. (2010) mengeluarkan teori pensinyalan, yang menyatakan bahwa bisnis sering mengungkapkan lebih banyak detail daripada yang sangat diperlukan. Pembaca akan menafsirkan informasi akuntansi secara positif jika manajemen mengantisipasi pertumbuhan tinggi. Sebagai hasil dari sinyal ini, investor mulai membeli saham perusahaan. Laporan keuangan menggunakan istilah "window dressing" karena alasan ini. Ini penting bagi calon investor untuk mengetahui agar mereka tidak salah memahami laporan keuangan perusahaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian di atas, penulis meneliti tentang *gap* penelitian yang terjadi dalam tesis dengan judul **“Leverage sebagai Pemoderasi Hubungan Good Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan Agresivitas Pajak terhadap Financial Distress Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), pengungkapan *Corporate*

---

<sup>19</sup> Hafidhia Ihsan, dkk, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*, Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 10 No. 1 April 2023. Hal. 82

<sup>20</sup> Arswendy Danardhito, dkk, *Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan*, Jurnal Pajak Indonesia Vol. 7, No. 1. Hal. 48

*Sosial Responsibility* (CSR), dan agresivitas pajak terhadap tekanan pada kondisi keuangan perusahaan dengan variabel moderasi tingkat *leverage*. Penelitian ini berfokus pada perusahaan energi di sub-sektor pertambangan, yang mengandalkan sumber daya alam Indonesia sebagai komoditas utama, berupa bahan tambang, dan telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Peran manajemen dalam melaksanakan operasional perusahaan yang baik sangat diperlukan dalam menjamin usaha berada pada kestabilan keuangan dan menghindari kondisi kemerosotan kondisi keuangan. Sayangnya, dalam beberapa kondisi manajemen diharuskan untuk menentukan kebijakan terbaik yang dibatasi pada pilihan mengenai kestabilan keuangan, ketaatan pada peraturan, efisiensi operasi, hingga citra perusahaan bagi pihak eksternal. Hal ini menimbulkan tarik ulur kebijakan yang dipengaruhi pada kompetensi dan integritas manajemen.
- b. Kebijakan terkait CSR yang mempertimbangkan keseimbangan bisnis dengan kelangsungan alam menjadi sorotan publik. Terlebih untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam, pelaksanaan CSR yang dikemas dalam *islamic framework* tentu dapat menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini di satu pihak dapat membangun citra yang baik bagi

perusahaan namun dapat memberikan tekanan pada kondisi keuangan perusahaan.

- c. Kecenderungan perusahaan dalam menerapkan strategi pajak yang agresif dapat mendorong praktik *window dressing* untuk memperbaiki citra keuangan. Hal ini dapat mengarahkan perusahaan pada *grey area* ketaatan atas peraturan perpajakan yang berlaku dimana dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mendorong kemerosotan keuangan perusahaan di masa depan.
- d. Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam memahami kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan. Kesehatan keuangan yang salah satunya dinilai dengan komposisi hutang atas aset perusahaan dapat menggambarkan kemungkinan terburuk yang terjadi apabila kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan.
- e. Kegagalan membaca informasi dalam laporan keuangan dapat mengarah pada kebangkrutan usaha bagi internal perusahaan. Di sisi lain, kegagalan membaca sinyal kesehatan keuangan perusahaan dapat mengarah pada kesalahan pilihan investasi yang tidak menguntungkan bagi investor.
- f. Ketitakselarasan beberapa hasil penelitian dengan tema sejenis yang mengarah pada perlunya analisis lebih lanjut mengenai variabel-variabel penelitian yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), agresivitas pajak, pada *financial distress* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel moderasi.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu :

- a. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada variabel X yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai  $X_1$ , pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai  $X_2$ , agresivitas pajak sebagai  $X_3$ , dan variabel Y yaitu *financial distress* perusahaan serta *leverage* sebagai variabel moderasi (M).
- b. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek perusahaan energi yang berfokus pada bidang pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah di Indonesia. Data *time series* yang digunakan adalah laporan keuangan semesteran tahun 2021-2024 dengan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 18 (delapan belas) perusahaan. Perusahaan yang dipilih masing-masing memenuhi 8 periode waktu laporan keuangan semesteran yang dipersyaratkan.
- c. Data yang diperlukan dalam penelitian ini merujuk pada data laporan keuangan perusahaan yang tercantum dalam laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Jika diperlukan, akan digunakan pula data pelengkap dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil publikasi instansi terkait, serta data lain sesuai kebutuhan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh GCG terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengungkapan CSR terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh agresivitas pajak terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?
4. Bagaimana *leverage* memoderasi pengaruh GCG terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?
5. Bagaimana *leverage* memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?
6. Bagaimana *leverage* memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh GCG terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* dalam memoderasi pengaruh GCG terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh *leverage* dalam memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh *leverage* dalam memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis ini merupakan jawaban awal dari masalah yang sebelumnya telah dirumuskan, yaitu :

1. GCG berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
2. Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
3. Agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.
4. *Leverage* memoderasi pengaruh GCG terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia.

5. *Leverage* memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
6. *Leverage* memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan untuk melengkapi referensi maupun informasi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan sebagai sinyal awal kesehatan perusahaan. Pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang melaporkan performa keuangan yang prima. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi instansi/lembaga pengawas di bidang perpajakan untuk lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan yang terindikasi

melakukan kebijakan agresif di bidang perpajakan untuk tujuan *windows dressing*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah sejenis yang dilakukan oleh peneliti yang akan datang untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dalam menganalisis tema sejenis.

c. Bagi Pelaku Investasi Saham Syariah (Investor)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang berbagai pilihan investasi saham syariah yang tersedia bagi investor. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi penempatan dana masyarakat ke dalam portofolio efek yang optimal guna meningkatkan hasil investasi di perusahaan.

## **G. Penegasan Istilah**

Pada bagian Penegasan Istilah ini, peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu penegasan secara konseptual dan penegasan secara operasional dengan uraian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan secara konseptual bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap makna maupun arti dari istilah-istilah yang diteliti. Peneliti menggunakan penegasan istilah yang sesuai dengan konteks penelitian yang berasal dari pendapat serta teori pakar yang dituangkan dalam berbagai

tulisan baik berupa buku, publikasi, dan karya ilmiah terdahulu. Selain itu, peneliti juga menggunakan rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamus versi *online/daring*) agar tidak menimbulkan salah arti dalam menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Beberapa istilah berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti antara lain:

a. *Financial Distress*

*Financial distress* adalah kondisi di mana arus kas operasional perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban saat ini, seperti kredit perdagangan atau pembayaran bunga, sehingga perusahaan harus mengambil langkah korektif.<sup>21</sup> *Financial distress* merupakan kondisi awal yang dapat mengarah pada rugi berkepanjangan dan berujung pada kebangkrutan jika tidak diantisipasi dengan baik oleh direksi. Bila perusahaan mengalami kekurangan kas, pada dasarnya manajemen tidak mengetahui apakah hal tersebut bersifat permanen atau sementara sehingga diperlukan tindakan restrukturisasi segera.<sup>22</sup> Publik dapat menganalisis kondisi *financial distress* berdasarkan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan, dengan membandingkan rasio keuangan dari tahun sebelumnya.<sup>23</sup>

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG adalah sistem yang bertugas mengelola dan memantau proses pengendalian bisnis yang berlangsung secara berkesinambungan guna

---

<sup>21</sup> Agus Zainul Arifin, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 189

<sup>22</sup> *Ibid.*, 196

<sup>23</sup> Fernando Prasetya dan Yenni Carolina, *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dimoderasi Kinerja Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698 Volume 15, Nomor 1, Mei 2023, pp 153

meningkatkan nilai saham, yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan nilai perusahaan.<sup>24</sup> GCG merupakan sistem manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien. GCG bertujuan untuk mencegah salah alokasi dana investasi, serta menghindari praktik korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif. Selain itu, sistem ini menekankan disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik guna mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis.<sup>25</sup> GCG tidak hanya berfokus pada usaha namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat. Mekanisme GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun RUPS untuk menaikkan nilai tambah pada pemegang saham.<sup>26</sup>

c. Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

CSR atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan yang berinvestasi. CSR bertujuan untuk menjaga hubungan yang selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat lokal.<sup>27</sup> CSR adalah upaya bisnis untuk menyeimbangkan

---

<sup>24</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 10

<sup>25</sup> Kirani Salsabila dan Ruly Priantilianingiasari, *Implementation of Accountability and Transparency in Financial Management of Miftahul Jannah Mosque in Blitar District Based on Isak* 35, *Balance: Journal of Islamic Accounting* Vol 4 No 2 Desember 2023

<sup>26</sup> Franita, *Mekanisme Good*, 11

<sup>27</sup> Abdul Aziz, dkk, *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, dan Implementasi Praktis* (Malang: Pustaka Peradaban, 2023), 151

komitmen kepada individu dan kelompok relevan dengan lingkungan sosialnya.<sup>28</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh perubahan dan pergeseran paradigma dalam dunia bisnis. Kini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk bertindak secara etis serta berkontribusi dalam menciptakan investasi sosial.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, seiring dengan waktu berkembang konsep *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR) yang tidak hanya mengedepankan konsep CSR bagi *stakeholder*, namun juga menambahkan ketentuan mengenai CSR yang sesuai dengan syariaah Islam. ICSR adalah konsep pertanggungjawaban sosial yang didasarkan pada Alquran dan Sunnah.<sup>30</sup> Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi antara internal perusahaan pada pembaca laporan keuangan sebagai bentuk transparansi atas kegiatan perusahaan yang sejalan antara nilai finansial, sosial, dan lingkungan.

#### d. Agresivitas Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya komprehensif yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Wajib Pajak untuk memastikan pengelolaan aspek perpajakan berjalan dengan baik, efisien, ekonomis, dan efektif. Tujuan utama dari strategi ini adalah memaksimalkan kontribusi terhadap

---

<sup>28</sup> Nendy Pratama Agusfianto, dkk, *Pengantar Bisnis: Respon Dinamika Era Digital* (Batu Layar: Seval Literindo Kreasi, 2023), 20

<sup>29</sup> Ibid., 80

<sup>30</sup> Andi Sulfiati, *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Jakarta Islamic Index-70*, *Insan Cita Bongaya Research Journal*, Volume 1, No.3 Juni 2022

kelangsungan usaha tanpa mengesampingkan kepentingan penerimaan negara.<sup>31</sup> Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk menghindari pajak dengan cara-cara ilegal, manajemen pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan yang berlaku dengan cara-cara yang legal biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Konsep agresivitas pajak mencerminkan strategi perusahaan dalam mengurangi atau bahkan meniadakan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dalam regulasi perpajakan. Pendekatan ini dapat melibatkan eksploitasi kelemahan aturan atau pemanfaatan peluang yang tersedia, tetap berada dalam koridor *grey area*, serta mengikuti regulasi perpajakan yang diperbolehkan.<sup>32</sup>

e. *Leverage*

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan didanai melalui utang. *Leverage ratio* dapat diartikan sebagai *total debt to total assets ratio* dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang.<sup>33</sup> *Leverage* dapat disebut juga sebagai rasio hutang atau rasio *solvabilitas*. *Leverage* juga menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai dari hutang perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan.<sup>34</sup> Hal ini dikarenakan tingkat

---

<sup>31</sup> Eva Henriati dan Amor Marundha, *Manajemen Perpajakan: Overview dan Tax Planning* (Purwokerto: Amerta Media, 2024), 77

<sup>32</sup> Hanlon, *A Review*, 128

<sup>33</sup> Nendy Pratama Agusfianto, dkk, *Pengantar Bisnis: Respon Dinamika Era Digital*, Batu Layar: Seval Literindo Kreasi, 2023

<sup>34</sup> Hafifhia Ihsan, dkk, *Pengaruh Profitabilitas*, 82

*leverage* menunjukkan dominasi hutang atas kepemilikan aset perusahaan dimana terdapat risiko pembayaran bunga dan pokok serta risiko gagal bayar yang ditanggung perusahaan.

## 2. Penegasan Operasional

### a. *Financial Distress*

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kondisi *financial distress*, yaitu suatu keadaan keuangan yang mengalami tekanan akibat kegagalan operasi untuk memenuhi berbagai kepentingan perusahaan, baik untuk kepentingan operasional maupun kepentingan berjaga-jaga untuk memenuhi kewajiban atau hutang. Dalam penelitian ini, *financial distress* diproksikan menggunakan nilai *S-score* yang dikembangkan oleh Springate dengan rumus sebagai berikut:

$$S\text{-score} = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D$$

Keterangan:

*S-score* = nilai Springate

A = Modal kerja dibagi total aset

B = EBIT dibagi total aset

C = EBT dibagi kewajiban lancar

D = Penjualan dibagi total aset

Nilai *S-Score* (Variabel Y) akan mengelompokkan perusahaan ke dalam kelompok perusahaan yang berada pada kondisi sehat (*safe zone*) jika memiliki nilai *S-Score*  $\geq 0,862$  sedangkan perusahaan akan tergolong dalam perusahaan dengan risiko kebangkrutan (*distress zone*) jika memiliki nilai S-

$Score < 0,862$ . Nilai *S-Score* akan memisahkan perusahaan sampel menjadi dua golongan besar untuk kemudian diteliti hubungannya dengan variabel-variabel lainnya.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan kombinasi antara kinerja direksi yang efektif serta pengawasan dewan komisaris yang optimal. Di Indonesia, kedua fungsi ini dipisahkan dengan kewenangan yang berbeda. Pemisahan fungsi ini mendorong perusahaan untuk dijalankan dengan profesionalisme dewan direksi serta independensi komisaris sebagai pengawas dan penasihat kebijakan yang diambil oleh dewan direksi. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* memberikan dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan kinerja serta menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Hal ini menciptakan kekuatan yang berorientasi pada keunggulan perusahaan serta upaya maksimalisasi keuntungan finansial. Selain itu, GCG berperan dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan kepentingan masyarakat. GCG dapat diproksikan dengan keberadaan komisaris yang mendorong integritas untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam penelitian ini, GCG diproksikan dengan kepemilikan independen dan diukur menggunakan rumus:

$$\text{Kepemilikan independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

c. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR adalah pengejawantahan kewajiban sosial dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan tidak hanya berfokus pada keunggulan finansial, namun juga berupaya mencapai keseimbangan antara kelestarian alam, keberlangsungan hubungan sosial, serta citra yang baik bagi perusahaan. Berfokus pada CSR yang beretika dapat mengambil perhatian konsumen dan dapat mendorong pada nilai tambah perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. CSR memiliki peran krusial, terutama pada perusahaan sub-sektor bahan kimia, karena menjadi indikator utama dalam menilai perusahaan dari perspektif sosial.<sup>35</sup> CSR dalam penelitian ini diproksikan dengan *dummy variable* dimana perusahaan yang diteliti akan diberikan poin 1 jika melakukan pengungkapan terkait CSR dalam laporan keuangannya dan diberikan poin 0 jika sebaliknya.

1 = perusahaan melakukan pengungkapan terkait CSR pada laporan keuangan

0 = perusahaan tidak melakukan pengungkapan terkait CSR pada laporan keuangan

d. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merujuk pada strategi perusahaan dalam mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak melalui perencanaan, baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui berbagai upaya hingga upaya

---

<sup>35</sup> Vivi Astrika, dkk, *Pengaruh CSR*, 52

penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara terang-terangan. Agresivitas pajak dapat menguntungkan ketika dijalankan dengan pengetahuan yang cukup tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan penghematan tersebut, perusahaan dapat menggunakan sumber daya untuk kepentingan pengembangan usaha. Di sisi lain, kerugian dari agresivitas pajak adalah adanya kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan nilai *effective tax rate* (ETR) yaitu perbandingan nilai beban pajak dengan nilai laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan. ETR diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Total}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

e. *Leverage*

*Leverage* mencerminkan tingkat utang yang dimiliki perusahaan sebagai sumber pembiayaan aset melalui dana pinjaman yang dikenakan beban bunga. Rasio *leverage* mengindikasikan seberapa besar utang digunakan dalam mendanai aset perusahaan. *Leverage* dapat diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dimana nilai DAR dihitung dengan membandingkan antara nilai total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

## **H. Sistematika Penulisan**

Halaman Judul

Persetujuan

Pengesahan

Pernyataan Keaslian

Motto

Persembahan

Prakata

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Abstrak

*Abstract*

Daftar Isi

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Hipotesis Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian

G. Penegasan Istilah

H. Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Deskripsi Teori

B. Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konseptual

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Rancangan Penelitian

B. Variabel Penelitian

C. Populasi dan Sampel Penelitian

D. Instrumen Penelitian

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data

B. Uji Asumsi Klasik

C. Uji Regresi Linear Berganda

D. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

E. Uji Hipotesis

F. Teknik Analisis Data

## **BAB V PEMBAHASAN**

- A. *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
- B. Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
- C. Agresivitas Pajak terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
- D. *Leverage* Memoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
- E. *Leverage* Memoderasi Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia
- F. *Leverage* Memoderasi Agresivitas Pajak terhadap *Financial Distress* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Indonesia

## **BAB VI PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Implikasi
- C. Saran

## **DAFTAR RUJUKAN**